REFLEKSI TERHADAP WACANA PROSES KEBIJAKAN BERBASIS RISET

REFLECTION ON DISCOURSE OF RESEARCH BASED POLICY PROCESS

Gunawan dan Endro Winarno

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Kementerian Sosial RI. Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta Indonesia
Telp. (0274) 377265

E-mail: gun_prawiro@yahoo.co.id dan endrowinarno20@yahoo.com

Naskah diterima 18 Juni 2017, direvisi 10 Juli 2017, disetujui 2 Agustus 2017

Abstract

Research is an important aspect that has been used as one of the basic considerations for the process of a policy. In developed countries, every policy of non-governmental institutions, business entities, and non-profit institutions can hardly be detached from the existence of research. Attempts to locate research results as the base for the policy process have been conducted by Indonesia for more than fifty years, but the results are still not optimum yet. This paper aimed to reveal a number of issues that are still faced by research institutions, especially in the Ministry of Social Affairs in placing research as one of the empirical references to the policy process. From the discourse it was revealed that the main issue was how the research can be understood as an important ingredient in the determination of policy alternatives. Comprehensive (intersectoral) and interdisciplinary research was needed to address the increasing complex social problems. Increasing the capacity of researchers, both quantity and quality in responding to the problem was still urgently needed. On the other hand, the synchronization of research programs, both within the research and development institutions, the technical units of ministries and sectoral agencies within the central and local governments still face many obstacles. Therefore, the manifestation of the discourse of a research-based policy process needs to be developed in the form of similar perceptions between inter-organizations since the determination of issues, the formulation of the problem, to reporting the results, without overriding the rules (methodology and administration) of research to ensure the credibility of the results. The logical consequence of this is closely related to the readiness of researchers and research infrastructure, including budget support.

Keywords: *Policy Process, Research Based, Discourse.*

Abstrak

Riset merupakan aspek penting yang telah dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi proses sebuah kebijakan, bahkan setiap kebijakan negara maju, lembaga non pemerintah, lembaga usaha, dan lembaga nirlaba hampir tidak bisa terlepas dari keberadaan riset. Upaya penempatan hasil riset sebagai landasan proses kebijakan telah dilakukan Indonesia selama lebih dari lima puluh tahun, tetapi hasilnya masih belum optimal. Naskah ini bertujuan mengungkap sejumlah persoalan yang dihadapi lembaga penelitian, khususnya di Kementerian Sosial dalam menempatkan riset sebagai salah satu referensi empirik proses kebijakan. Dari pembahasan ini terungkap bahwa persoalan utamanya adalah bagaimana riset itu dapat dipahami sebagai bahan penting dalam penentuan alternatif kebijakan. Penelitian komprehensif (intersektoral) dan interdisiplin ilmu sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan sosial yang semakin besar sekaligus semakin kompleks. Peningkatan kapasitas peneliti, baik kuantitas maupun kualitas dalam merespons persoalan tersebut sangat dibutuhkan. Pada sisi lain, sinkronisasi program penelitian, baik di lingkungan lembaga penelitian dan pengembangan, unit teknis kementerian maupun instansi sektoral di lingkungan pemerintah pusat dan daerah masih mengalami banyak hambatan. Pengejawantahan

wacana proses kebijakan berbasis riset perlu dibangun berupa kesamaan persepsi antarorganisasi termaksud sejak penentuan isu, perumusan masalah, hingga pelaporan hasil, tanpa mengesampingkan kaidah (metodologi dan administrasi) penelitian untuk menjamin kredibilitas hasil. Konsekuensi logisnya sangat terkait dengan kesiapan peneliti dan sarana prasarana penelitian, termasuk dukungan penganggaran.

Kata kunci: Proses Kebijakan, Basis Riset, Wacana.

A. PENDAHULUAN

Penelitian dan pengembangan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian proses penetapan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, penilaian, reformasi, hingga terminasi suatu kebijakan publik. Dalam konteks penanganan permasalahan sosial, minimal terdapat tiga manfaat yang dapat diharapkan dari keberadaan penelitian dan pengembangan sebagai penunjang proses kebijakan publik, yakni pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu permasalahan, upaya untuk mengurai permasalahan, dan upaya penanganan permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perhatian bangsa Indonesia terhadap penelitian dan pengembangan telah mulai dirintis sejak terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1964 tentang Badan Perencanaan dan Penelitian Departemen yang mengatur keberadaan Badan Perencanaan Departemen (Baperdep) langsung berada dalam bimbingan dan pengawasan menteri di setiap departemen. Badan ini bertugas 1) menyusun rencana pembangunan tahunan, rencana tahapan kedua, ketiga, dan seterusnya terhitung mulai pengajuan usulan penyempurnaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969; 2) menjalankan penelitian dan penyelidikan untuk keperluan perencanaan pembangunan, rencana rinciannya, rencana susunan organisasinya, serta rencana pelaksanaan dan sistem pengawasannya; 3) mengadakan hubungan-hubungan teratur dan sistematis dengan Departemen Riset Nasional serta lembaga riset yang berada dalam kewenangan departemen tersebut guna keperluan pengumpulan data ilmiah seperlunya. Dengan demikian tugas peneliti tidak sekadar menjalankan penelitian, namun juga terlibat dalam perencanaan pembangunan.

Di era reformasi, lembaga penyelenggara penelitian dan pengembangan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu dan Teknologi pada Pasal 1 Angka 12 adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan. Pengertian ini dipertegas pada Pasal 6 Ayat 1 bahwa kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri dari unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang, yang antara lain berfungsi 1) mengorganisasi pembentukan sumberdaya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi; serta 2) membentuk iklim dan memberi dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menjamin terselenggaranya Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, lembaga litbang merupakan salah satu unsur yang harus ada. Hal ini seperti yang digariskan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 bahwa lembaga litbang merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga kelitbang bertanggungjawab mencari berbagai invensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggali potensi pendayagunaannya. Lembaga litbang dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan atau organisasi masyarakat

Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 juga menggariskan bahwa pemerintah pusat berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pemerintah daerah berfungsi menumbuhkan dan mengembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Setelah lebih dari setengah abad, pemerintah telah berhasil membangun ratusan lembaga penelitian dan pengembangan, baik di lingkungan instansi pemerintah, perguruan tinggi, maupun lembaga swasta beserta ribuan peneliti. Menurut Sekretaris Dewan Riset Nasional, terdapat 622 satuan kerja litbang dengan perincian 301 perguruan tinggi swasta, 114 perguruan tinggi negeri, 91 lembaga litbang non departemen, 76 lembaga litbang departemen, 24 lembaga litbang daerah, 8 lembaga litbang Badan Usaha Milik Negara, dan 8 lembaga litbang milik swasta (Kompas, 11 September 2008). Perkembangan selama kurun waktu 7 tahun, jumlah perguruan tinggi di Indonesia juga telah mengalami peningkatan, yakni mencapai 479 perguruan tinggi. Dari hasil akreditasi terdapat 26 perguruan tinggi terakreditasi A, 210 perguruan tinggi terakreditasi B, dan 243 perguruan tinggi dalam kategori pembinaan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan bekerjasama dengan Koodinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), ABPTSI (Asosiasi Badan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), dan APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia). Dari perspektif lain, terdapat 21.657 program studi yang telah terakreditasi (Kemenristekdikti, 2015). Kondisi ini merupakan dukungan besar, baik dalam peningkatan kuantitas dan kualitas peneliti

maupun kualitas produk penelitian.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah peneliti. Di lingkungan pemerintah, menurut arsip fisik yang berisi data hasil penilaian angka kredit pejabat fungsional peneliti pusat (nasional), jumlah peneliti di seluruh lembaga penelitian, baik kementerian maupun non kementerian, dari jabatan fungsional peneliti terendah hingga jabatan fungsional peneliti tertinggi sebanyak 9.661 orang peneliti dengan latarbelakang berbagai ilmu dan kepakaran (LIPI, *n.d*). Pemerintah juga senantiasa berupaya meningkatkan kualitas peneliti beserta hasil penelitian produk lembaga penelitian, baik kementerian maupun non kementerian, antara lain melalui program peningkatan kapasitas peneliti dan dukungan anggaran penelitian. Dukungan anggaran penelitian berupa 1) Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO), yakni program pendanaan riset bersifat multidisiplin yang dilaksanakan dalam tahun jamak (*multiyears*). Bantuan ini ditujukan untuk mendorong inovasi produk riset yang terarah pada komersialisasi/implementasi hasil riset, 2) Program Insentif Riset untuk Peneliti dan Perekayasa di lingkungan lembaga penelitian kementerian dan non kementerian.

Pada tahun 2009-2012 pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan dana Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PPKPP) selama empat tahun. Pada tahun 2009 dana tersebut disalurkan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, sedang pada tahun 2010 hingga 2012, dana insentif riset disalurkan melalui Kementerian Riset dan Teknologi. Di lingkungan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, penggunaan dana insentif riset tercatat sebagai berikut.

Tabel 1
Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perakayasa (PKPP)
Di Lingkungan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2009 - 2012

No	Tahun, Sumber	Pengajuan yang disetujui	Total Anggaran	Keterangan
1	2009 Ditjen Dikti Depdiknas	- Puslitbang Kesos 7 tim (30 peneliti) - B2P3KS Yogya 11 tim (40 peneliti)	Rp 3.500.000.000,-	Seluruh usulan diterima Ditjen Dikti.
2	2010 Kemenristek	- Puslitbang Kesos 4 tim (26 peneliti) - B2P3KS Yogya 6 tim (35 peneliti)	Pagu 61 x 50 jt/peneliti Rp 3.050.000.000,- Disetujui Rp 1.950.000.000,-	Kebijakan Kabadiklit dana untuk semua peneliti (@ Rp. 31.900.000,-)
3	2011 Kemenristek	Diajukan 11 tim (61 peneliti) Disetujui 9 tim (42 peneliti): - Puslitbang Kesos 6 tim (30 peneliti) - B2P3KS Yogya 3 tim (12 peneliti)	Rp 2.100.000.000,-	- SK Penerima PKPP langsung dari Menristek berdasarkan hasil seleksi. - Dana tidak dapat dimanfaatkan seperti 2010.
4	2012 Kemenristek	Diajukan 15 tim (72 peneliti) Disetujui 10 tim (47 peneliti): - Puslitbang Kesos 5 tim (22 peneliti) - B2P3KS Yogya 5 tim (25 peneliti)	Rp 2.350.000.000,-	- SK Penerima PKPP langsung dari Menristek berdasarkan hasil seleksi.

Sumber: Rekapitulasi Pengelolaan PKPP Di Lingkungan Badiklit Kesos Kemensos, 2012.

Apabila hasil penelitian terdokumentasikan dan tersosialisasikan dengan baik, terlebih-lebih dapat menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan, tentu akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas. Selama ini hasil penelitian telah mendapatkan apresiasi dari penyusun kebijakan, namun tanpa mengurangi penghargaan terhadap hasil yang dicapai, persoalannya adalah bagaimana perkembangan pemanfaatan hasil penelitian bagi dasar penyusunan kebijakan. Dalam pertemuan pembahasan hasil penelitian seringkali terungkap pernyataan "*hasil penelitian belum dapat diimplementasikan*". Kondisi demikian menunjukkan bahwa untuk meletakkan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan masih perlu kerja keras.

Bruce Alberts, Ilmuwan dari *National Academy of Science* Amerika Serikat dalam Jeanindya (2010) mengemukakan pentingnya peleburan peneliti berbagai bidang di Indonesia. Bruce mengamati, selama ini di Indonesia belum didapatkan kolaborasi dan komunikasi yang apik antara peneliti dengan penyusun kebijakan. Sebenarnya peneliti memiliki peran penting untuk mempengaruhi kebijakan, yang perlu dilakukan lebih intens adalah komunikasi. Bruce mengakui bahwa bahasa ilmiah sangat berbeda dengan bahasa politik, sehingga kedua pihak sering salah menginterpretasikan maksud masing-masing. Karena itu perlu ada interpretasi dari bahasa ilmiah ke bahasa yang lebih populer agar lebih dimengerti penyusun kebijakan. Apalagi dunia politik sangat berbeda dengan dunia ilmiah, sehingga apa yang diharapkan ilmuwan kepada penyusun kebijakan seringkali

terabaikan. Keterlibatan ilmuwan dalam proses kebijakan menjadi hal yang sangat penting, pasalnya pembuat kebijakan memerlukan data pasti dari lapangan sebelum menentukan suatu langkah. Analogi dari pandangan Bruce Albert tersebut adalah sinkronisasi antara unit teknis dengan unit riset.

Penelaahan terhadap pemanfaatan hasil riset dalam proses kebijakan, tentu saja tidak hanya sebatas bagaimana membangun komunikasi antara unit teknis dengan unit riset, tetapi perlu upaya yang sifatnya lebih mengikat. Sinkronisasi ini telah dijadikan sebagai wacana proses kebijakan berbasis riset dalam dialog "Menjembatani Penelitian dengan Pengambilan Kebijakan" yang berlangsung di Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Andrinof Chaniago mengemukakan keberadaan *gap* antara pengambil kebijakan dengan penyedia data, padahal kebijakan berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam. Oleh karena itu, pemerintah akan selalu mendorong setiap proses kebijakan di pusat dan daerah agar didasarkan pada hasil riset berupa pengetahuan dan data yang sudah teruji, lanjut Andrinof dengan mengutip pendapat Grehenson (2015) bahwa "kebijakan berkualitas berkaitan erat dengan dukungan penguatan hasil kajian dan riset".

Peletakkan hasil riset sebagai dasar proses kebijakan, pada satu sisi sangat terkait dengan kuantitas dan kualitas peneliti beserta hasil penelitian mereka, sedangkan pada sisi yang lain sangat tergantung pada *goodwill* atau *political will* berupa *willingness* atau hasrat dari pembuat kebijakan (*policy maker*). Celakanya, ketika upaya penguatan kontribusi penelitian sebagai infrastruktur proses kebijakan sedang mengemuka, muncullah kondisi kontra produktif berupa diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Implementasi peraturan ini membawa dampak, yakni hingga akhir tahun 2017 akan pensiun sebanyak 228 orang peneliti yang tersebar di 42 lembaga penelitian, sedang pada tahun berikutnya (2018) diperkirakan sebanyak 556 orang peneliti akan segera

menyusul memasuki masa pensiun (Kompas, 2017). Jumlah peneliti yang harus pensiun belum termasuk peneliti yang bekerja di lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi.

B. ISU YANG PERLU DIRESPOON PENELITI

Perkembangan ilmu dan teknologi di era industrialisasi dan globalisasi informasi telah memicu laju perubahan sosial pada masyarakat Indonesia. Meski di satu sisi kemajuan berbagai bidang penghidupan dan kehidupan masyarakat telah memberi kontribusi pada kesejahteraan umat manusia, namun tidak semua warga masyarakat mampu mengimbangi atau beradaptasi dengan cepatnya kemajuan tersebut. Kondisi ini tentu akan berdampak pada meningkatnya permasalahan sosial di Indonesia. Sejumlah fenomena yang perlu dijadikan perhatian antara lain:

1. Goncangan ekonomi dunia (krisis ekonomi Eropa) sejak akhir tahun 2008 berdampak pada pemutusan hubungan kerja jutaan tenaga kerja di lingkungan industri tekstil, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.
2. Keputusan pemerintah Indonesia untuk ikut dalam pasar bebas (*free trade*) merupakan salah satu determinasi penting yang perlu dijadikan perhatian. Terlebih-lebih sejak 1 Januari 2010 perkembangan perdagangan bebas *Asean Free Trade Area* (AFTA) telah diperluas dengan melibatkan Cina (*ASEAN - China Free Trade Area*), sehingga persaingan dagang menjadi lebih ketat, diantaranya penawaran barang produksi China dengan harga lebih rendah dari harga produk domestik. Sebagai ilustrasi, Baju Batik *made in China* seharga Rp 18.500,- dapat dijumpai di pertokoan Jalan Malioboro Yogyakarta. Melalui permainan harga ini tidak menutup kemungkinan dapat menggusur pengusaha kecil dan menengah di Indonesia.
3. Perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Dalam konteks ini Loekman Soetrisno (1995) mengemukakan bahwa teknologi industri yang dibangun di negara-negara berkembang, seperti halnya di Indonesia tidak *link and match* dengan kualitas

sumberdaya manusia yang tersedia. Dalam situasi ini tidak sedikit warga masyarakat yang terdesak dan tergusur, bahkan "terasing" di tengah masyarakat industri. Keterasingan sebagian warga masyarakat di saat negara tengah memasuki era industri disebabkan munculnya pola-pola hidup baru sebagai akibat dari tuntutan manajemen industri. Keprihatinan ilmuwan sosial terhadap dampak negatif dari perkembangan industrialisasi semakin menguat. Keprihatinan Atal dan Pieris (1980) seperti dikutip Soetomo (2012) dalam simposium *Asean Rethinking of Development*, bahwa persoalan yang cukup mendapat sorotan adalah apakah negara-negara berkembang harus mengorbankan kepribadian bangsa demi meraih keuntungan ekonomi seperti dijanjikan proses modernisasi?, sementara sejumlah negara maju sedang memperlihatkan ketegangan karena ketidakmampuan menjawab tantangan sosial-budaya dari industrialisasi yang sangat cepat.

4. Pasar modern, seperti Toserba, *Giant*, *Carrefour*, *WTC*, *ITC* di setiap kota dan waralaba, seperti *Indomaret* dan *Alfamart* yang tumbuh 10–30 persen per tahun dan telah menjamah setiap pelosok wilayah hingga kawasan permukiman. Pesatnya pertumbuhan ratusan mini market ini dari waktu ke waktu berimbas pada turunnya omzet dan pendapatan pedagang pasar tradisional (Sidik, 2013). Hasil penelitian AC Nielson (2003) menunjukkan adanya korelasi berbanding terbalik antara perkembangan pasar modern dengan pasar tradisional. Pasar modern telah tumbuh sebesar 31,4 persen, sedangkan pasar tradisional tumbuh secara negatif sebesar 8 persen. Berdasarkan asumsi *ceteris paribus*, dalam jangka beberapa tahun pasar tradisional akan lenyap.
5. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah permasalahan sosial yang dihadapi bangsa, tidak terkecuali "biaya demokrasi" cukup

tinggi yang harus dipikul pemerintah serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, baik legislatif maupun eksekutif.

6. Perubahan fungsi lahan produktif (pertanian) menjadi areal permukiman (hunian), industri, perniagaan, dan hiburan beserta infrastrukturnya telah ikut andil dalam memicu terjadinya perubahan perilaku dan kesenjangan sosial. Berkurangnya lahan pertanian di wilayah Bogor dan Karawang serta pembangunan jalan lingkar (*ring road*) di sejumlah kota di Pulau Jawa merupakan ilustrasi keberadaan fenomena tersebut.
7. Serangkaian upaya pengembangan profesionalisme pekerjaan sosial belum dapat berjalan secara optimal. Pekerjaan sosial masih saja berkuat pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang notabene terfokus pada warga masyarakat rentan, padahal apabila mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial boleh juga diarahkan kepada seluruh umat manusia (*humanity*), tidak sebatas hanya kepada warga masyarakat yang kurang beruntung atau rentan. Kompleksitas dinamika kehidupan yang dihadapi oleh berbagai kalangan masyarakat sangat membutuhkan sentuhan pekerja sosial demi tercapainya suatu kondisi seperti yang diharapkan.

Determinan tersebut merupakan sebagian kecil dari cakupan semesta permasalahan kesejahteraan sosial yang selama ini seringkali luput dari fokus perhatian Kementerian Sosial RI. Sementara itu, permasalahan sosial akibat dinamika alam (gunung meletus, banjir, tanah longsor, puting beliung); serta eksese keberhasilan pembangunan (pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketimpangan, ketidakadilan, keterasingan, kenakalan, penyimpangan perilaku) belum juga tertangani secara optimal. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa cakupan permasalahan kesejahteraan sosial semakin luas dan semakin kompleks dari waktu ke waktu.

Indonesia pernah mempunyai visi "Industri Maju didukung Pertanian Tangguh". Secara fisik; infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan

untuk menunjang pengembangan industri telah banyak disiapkan. Persoalannya adalah bagaimana kesiapan masyarakat memasuki era industrialisasi tersebut. Kondisi ini tentu saja memerlukan serangkaian upaya penyiapan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Dalam konteks ini transformasi pengetahuan dan teknologi semakin diperlukan.

Pada periode tahun 1994/1995-1998/1999 pengembangan masyarakat industri telah dijadikan sebagai salah satu fokus utama penelitian dan tugas Departemen Sosial RI. Seperti termaktub dalam Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sasaran Repelita Tahunan (SARLITA) Departemen Sosial RI Tahun 1994/1995-1998/1999; terdapat 11 judul penelitian terkait dengan teknologi dan industrialisasi diantara 25 judul yang dijadikan isu penelitian. Masing-masing penelitian tersebut diselenggarakan selama tiga tahun anggaran. (Kantor Menteri Riset dan Teknologi). Sejumlah judul penelitian yang secara eksplisit terkait dengan industrialisasi, antara lain 1) Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya Nasional dan Global yang Mendukung Proses Industrialisasi; 2) Penanggulangan Nilai Sosial

Bimbingan Sosial Guna Menyiapkan Masyarakat untuk Beradaptasi dalam Kehidupan Budaya Industri; 4) Pengembangan Konsep dan Model Pencegahan dan Penanganan Dampak Sosial Industrialisasi; 5) Pengembangan Mekanisme Sosial dalam Masyarakat yang Mendukung Proses Transformasi Industri; 6) Pengembangan Teknik Analisis Dampak Sosial untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Industri; 7) Pengembangan Kebijakan Sosial dalam rangka Penyusunan Kebijakan Industrialisasi; 8) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pekerja dalam Hubungan Kerja Industrialisasi Pancasila (termasuk Hubungan Kerja Sektor Informal).

Apabila SARLITA Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Departemen Sosial RI Tahun 1994/1995-1998/1999 disandingkan dengan Agenda Riset Nasional (ARN) 2010-2014 (Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2010-2014 yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2010), maka penelitian bidang sosial-kemanusiaan telah banyak mengalami perubahan, seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2

Tema Riset Unggulan Sosial-Kemanusiaan Agenda Riset Nasional Tahun 2010-2014

No	Topik	Target 2014	Indikator Keberhasilan 2014	Capaian 2025
1	Industri Pangan Terpilih	Ketersediaan peta permasalahan sosial (kemanusiaan, ekonomi, dan kelembagaan) dan strategi transformasi sosial serta saran kebijakan untuk pengembangan industri pangan terpilih	Dapat diatasinya permasalahan sosial dalam industri pangan terpilih	Dapat diatasinya permasalahan sosial dalam industri pangan terpilih
2	Industri Energi Terpilih	Ketersediaan peta permasalahan sosial (kemanusiaan, ekonomi, dan kelembagaan) dan strategi transformasi sosial serta saran kebijakan untuk pengembangan industri energi	Dapat diatasinya permasalahan sosial dalam industri energi terpilih	Dapat diatasinya permasalahan sosial dalam industri energi terpilih
3	Industri Obat Terpilih	Ketersediaan peta permasalahan sosial (kemanusiaan, ekonomi, dan kelembagaan) dan strategi transformasi sosial serta saran kebijakan untuk pengembangan industri obat	Dapat diatasinya permasalahan sosial dalam industri obat terpilih	Dapat diatasinya permasalahan sosial dalam industri obat terpilih

Sumber: Agenda Riset Nasional 2010-2014 hal. 193 <http://www.drn.go.id/files/buku-ARN-2010-2014.pdf>.

yang Menghambat Proses Industrialisasi; 3) Pengembangan Teknologi Penyuluhan dan

Berdasarkan telaahan terhadap topik penelitian di atas, dapat dikemukakan bahwa peta

permasalahan sosial semakin dibutuhkan. Peta permasalahan sosial tidak hanya sebatas untuk kepentingan pelayanan kesejahteraan sosial, namun diperlukan juga untuk pengembangan industri. Informasi ini memberi keyakinan bahwa permasalahan utama yang dihadapi bangsa dalam membangun negara adalah permasalahan sosial, bukan permasalahan teknologi. Ikhwal ini seiring dengan fokus bidang sosial kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam lampiran Kepmenristek Nomor 193/M/Kp/IV/2010 yang lebih menekankan pada permasalahan sosial dalam upaya transformasi inovasi teknologi yang dikelompokkan dalam ilmu eksak. Sedang dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penerapan teknologi berupa permasalahan sosial; sebagai sasaran Kementerian Sosial RI kurang mendapat tempat. Sementara hasil penelitian Litbang Kementerian Sosial RI yang terkait dengan pengembangan masyarakat industri masih sangat minim. Uraian ini mengindikasikan adanya peluang besar bagi peneliti kesejahteraan sosial untuk berperanserta dalam proses industrialisasi di Indonesia.

Ketika aspek sosial (baca: kesejahteraan sosial) kurang mendapatkan perhatian dalam agenda riset nasional, kemungkinan besar permasalahannya terkait dengan 1) Apakah karena informasi yang disampaikan di Dewan Riset Nasional tentang aspek sosial sangat minim atau bahkan tidak ada; 2) Apakah penelitian bidang kesejahteraan sosial tidak termasuk kategori IPTEK; 3) Apakah peneliti (secara kelembagaan) kurang atau tidak

memperjuangkan perlunya penelitian bidang kesejahteraan sosial di Dewan Riset Nasional (DRN). Apabila ditelusuri, pengembangan ilmu dan teknologi bidang sosial sebenarnya sudah banyak dilakukan. Kondisi ini tercermin dari berkembangnya sejumlah teknologi pendekatan masyarakat, seperti *Community Development, Community Organization, Rural Development, Integrated Rural Development, Particpatori Rural Appraisal, dan Rappid Particpatoty Appraisal*. Pada sisi lain, sejumlah cendekiawan, peneliti, dan pemerhati masalah sosial sering mengungkap bahwa permasalahan sosial di Indonesia semakin besar dan semakin kompleks. Kondisi ini membawa konsekuensi upaya pembangunan kesejahteraan sosial harus berpacu dengan berkembangnya permasalahan sosial tersebut. Persoalannya, apakah kompleksitas permasalahan sosial sudah cukup dipetakan ke dalam 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial? Pengendapan emosi dan kejelian dalam memandang masalah serta keseriusan berpikir sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini.

Riset sosial telah memperoleh perhatian yang lebih luas dan terintegrasi. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2016, yakni terdapat tiga fokus (diantara 10 fokus yang diselenggarakan terintegrasi) penelitian untuk Kementerian sosial, yakni 1) Kemaritiman; 2) Manajemen Penanggulangan Kebencanaan; dan 3) Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan. Beberapa diantaranya dapat dicermati dari tabel berikut.

Tabel 3
Integrasi Riset yang berkaitan dengan Bidang Tugas Kementerian Sosial RI

Fokus	Tema	Topik Riset	Institusi
Riset Bidang Kemaritiman	Ketahanan Sosial dan Penguatan Ekonomi Pesisir	Teknologi Kedaulatan Daerah 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terbelakang)	KKP, LHK, Kemensos, Kemenhub, LIPI, BBPT
		Pengelolaan Pesisir Perbatasan dari aspek <i>Social Security</i> dan <i>Prosperity</i>	LHK, KKP, Kemensos, Kemenpar dan LIPI
Riset Bidang Kebencanaan	Teknologi dan Manajemen Bencana	Regulasi dan Budaya Sadar Bencana	PPN/Bappenas, BNPB Kemensos, Kemendagri, Dikbud, Kemenhukham, LIPI, BIG
Riset Bidang Humaniora- Sosial Budaya- Pendidikan	Kajian Pembangunan Sosial Budaya	Kearifan Lokal <i>Indigenous Study</i> <i>Global Village</i>	Kemensos, Dikbud

Kajian <i>Sustainable Mobility</i>	<i>Urban Planning and Transportation</i>	Kemensos, Kemenhub
Kajian Penguatan Modal Sosial	Reformasi Agraria	DPDT2. Kemensos
	Pengentasan Kemiskinan dan Kemandirian Pangan	Kemensos, DPDT2.
	Rekayasa Sosial dan Pengembangan Perdesaan	Kemensos, DPDT2.
Ekonomi dan Sumber Daya Manusia	Kewirausahaan, Koperasi, dan UMKM	Kemensos, Dikbud, Kemenaker, Kemenperin, Kemendag
	Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing	Kemensos, Dikbud, Kemenaker, Kemenag
	Sosial Budaya Pendukung Pariwisata	Kemensos, Dikbud, Kemenaker

Sumber: RIRN 2015-2045 (Kemenristekdikti, 2016)

Tabel 2 dan Tabel 3 mengisyaratkan bahwa persoalan dan sasaran program berbagai instansi sektoral saling terintegrasi. Setiap lembaga mempunyai sasaran program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sementara pada tingkat implementasi, sasaran program masing-masing lembaga mempunyai keterkaitan yang sangat kuat (saling beririsan). Kenyataan ini membawa makna, bahwa kebutuhan riset terkait dengan Kementerian Sosial sangatlah luas. Topik riset peneliti di lingkungan Kementerian Sosial tidak hanya sebatas pada program yang diselenggarakan, namun termasuk juga riset terpadu untuk menemukan program terobosan inovatif dalam penanganan masalah sosial. Kebutuhan riset tidak hanya sebatas pada upaya penanganan masalah sosial *residual* (penyandang masalah kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial), namun juga menyangkut riset pembangunan (*developmental*) untuk mempersiapkan warga masyarakat dalam menghadapi setiap bentuk perubahan sosial. Dalam implementasi, berbagai permasalahan perlu dibedah secara menyeluruh menggunakan berbagai bidang ilmu (interdisiplin) antara lain Psikologi, Sosiologi, Ekonomi, Anthropologi, Politik, Geografi, Psikologi, Sejarah, bahkan apabila mungkin dari berbagai disiplin akademis di luar ilmu sosial. Ikhwal ini mengindikasikan perlunya variasi bidang kepakaran peneliti di lingkungan Kementerian Sosial.

Apabila diyakini bahwa perkembangan ilmu dan teknologi di era industrialisasi dan globalisasi informatika telah ikut memicu laju perubahan sosial, maka kemampuan adaptasi manusia sangat dibutuhkan. Oleh karena itu persoalan yang perlu mendapat perhatian tidak hanya sebatas pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun juga diperlukan sejumlah penelaahan terhadap 1) kondisi masyarakat rentan di era perubahan sosial yang berpotensi menjadi PMKS; beserta 2) kebijakan penanganan yang diperlukan.

Pada era perubahan, potensi sosial yang adapun telah mengalami perkembangan. Potensi kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran dapat bersumber dari individu atau organisasi yang diinisiasi, dibentuk, dibina, atau difasilitasi untuk dapat menjadi partner dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (baca: pelaksanaan program Kementerian Sosial RI). Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dimaksud, antara lain Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (LRBM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Organisasi Sosial (Orsos), atau Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Perkembangan terakhir telah ditandai dengan munculnya Rumah Sosial, Pelayanan Terpadu dan Gerakan Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita); serta Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Persoalannya adalah

apakah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial tersebut hanya sebatas pada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang dijadikan mitra penjangkauan pelayanan Kementerian Sosial RI dan telah terdata di Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Sosial RI. Apabila demikian, bagaimana dengan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat peduli permasalahan sosial, seperti Masyarakat Peduli Narkotika, Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari dunia usaha, dan kalangan praktisi sosial yang telah berkontribusi dalam penanganan berbagai bentuk permasalahan kesejahteraan sosial.

Menjawab perkembangan permasalahan dan potensi tersebut, pembaharuan (*upgrading*) konsep dan data tentang PMKS serta PSKS perlu dilakukan dan diselenggarakan secara kontinyu. Kondisi ini mengisyaratkan, bahwa eksistensi peneliti dalam menemukan model pelayanan terobosan yang mampu menjangkau sasaran yang jauh lebih luas semakin penting. Profesionalitas peneliti sudah menjadi tuntutan. Peneliti harus semakin jeli dan mampu dalam membaca, memprediksi, mengantisipasi, serta menemukan jawaban atas fenomena sosial yang terjadi. Pada sisi lain, peneliti harus mampu memainkan peran yang lebih besar dalam proses kebijakan.

C. KONTRIBUSI PENELITI DALAM PROSES KEBIJAKAN

Proses kebijakan, yakni sejak tahap penetapan agenda yang dilanjutkan dengan tahap formulasi atau penyusunan, adopsi, implementasi, evaluasi atau penilaian, reformasi atau penyempurnaan, hingga terminasi atau penghentian kebijakan (Dunn, 1999; Parsons, 2006; dan Winarno, 2007); peneliti merupakan salah satu aktor terpenting yang harus dilibatkan sesuai perundang-undangan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pada Pasal 98 Ayat 1 dikemukakan adanya unsur yang secara fungsional harus diikutsertakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni Perancang

Peraturan Perundang-undangan dan Peneliti.

Disebutkan dalam penjelasan bahwa Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 98 juga digariskan, selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 1, tahapan pembentukan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota juga melibatkan peneliti dan tenaga ahli. Ketentuan hukum ini dapat diinterpretasikan bahwa keterlibatan peneliti dalam proses kebijakan, terutama pada tahap formulasi atau penyusunan peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin (mengawal) agar hasil penelitian dijadikan sebagai referensi atau dasar pijakan. Ketentuan hukum tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan program.

Ikhwal yang menarik untuk dijadikan pelajaran terkait Program Berbasis Riset dapat dijumpai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Keseriusan dalam pelibatan Peneliti di ranah kebijakan tercermin dari terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Hasil Penelitian. Dalam keputusan itu, minimal terdapat empat pasal penting yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

1. Pasal 4 menggariskan bahwa setiap penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) dilaporkan kepada gubernur dan hasilnya disampaikan kepada Bappeda dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna.
2. Pasal 5 Ayat 1 menggariskan bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan SKPD dalam penyusunan program/kegiatan pemerintahan dan

pembangunan. Sedang Ayat 2 menggariskan bahwa pemanfaatan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 6 Ayat 1 menentukan bahwa dalam hal telah ada hasil penelitian, usulan program/kegiatan SKPD yang disampaikan ke Bappeda harus dilampiri rekomendasi Balitbangda. Sedang Pasal 6 Ayat 2 mengatur bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berisi penjelasan bahwa terhadap program/kegiatan tersebut telah dilakukan penelitian.
4. Pasal 7 Ayat 1 mengamanatkan bahwa terhadap pelaksanaan pemanfaatan penelitian oleh SKPD dilakukan evaluasi. Sedang Ayat 2 mengatur bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan oleh Bappeda dan Balitbangda. Sementara Ayat 3 menentukan bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan kepada gubernur.

Interpretasi dari keputusan tersebut adalah 1) Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan telah mempunyai *kekuatan mengikat* dalam penentuan kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan 2) peran peneliti dalam proses kebijakan sangat penting, yakni mulai dari penetapan agenda hingga penghentian kebijakan.

Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, secara *de jure* telah memberi kewenangan yang cukup leluasa kepada peneliti untuk berkontribusi dalam proses kebijakan, tetapi kenyataannya (*de facto*), peran peneliti masih sebatas sebagai pelaksana penelitian untuk menghasilkan dokumen. Hasil penelitian dan pengembangan belum juga mempunyai nilai manfaat yang memadai dalam formulasi kebijakan, kendati pihak operasional telah dilibatkan dalam proses penelitian untuk menjamin *link and match* dengan kebutuhan pelaksanaan tugas mereka. Sebaliknya, sejumlah peneliti memang telah dilibatkan dalam penyusunan panduan program oleh unit operasional, namun keterlibatannya

masih bersifat personal bukan sebagai pejabat (baca: peneliti) beserta kompetensinya. Hasil penelitian evaluasi juga belum memiliki kekuatan mengikat sebagaimana temuan dari auditor (baca: inspektorat) terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial tertentu. Hasil riset evaluasi mendapatkan apresiasi hanya sebatas hingga tahap diseminasi. Padahal seperti yang diketahui bersama, lembaga penelitian merupakan salah satu diantara tiga lembaga yang menjalankan fungsi evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan program kesejahteraan sosial, selain pelaksana (pemilik) program dan inspektorat.

D. MASALAH DAN TANTANGAN LEMBAGA LITBANG DI MASA DATANG

Telah disinggung pada bagian terdahulu dari tulisan ini, bahwa di negara maju ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi "tulang punggung" pembangunan. Di Indonesia, khususnya di lingkungan Kementerian Sosial RI, wacana Program Berbasis Riset telah marak dan senantiasa diungkapkan oleh para pemangku kebijakan pada berbagai *event* penting seperti upacara bendera, seminar, konferensi, rapat koordinasi, rapat kerja, atau *event-event* penting lainnya. Ikhwal ini menunjukkan sudah terbangunnya kesadaran untuk meletakkan dokumen (hasil) riset sebagai dasar penentuan kebijakan dan program, kendati serangkaian upaya membangun komitmen dari seluruh unsur di lingkungan Kementerian Sosial RI untuk meletakkan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar proses kebijakan masih memerlukan waktu dan perjuangan yang cukup panjang. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait upaya optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar proses kebijakan di lingkungan Kementerian Sosial RI, antara lain:

1. Sinkronisasi

Secara garis besar Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kementerian Sosial RI terdiri dari empat unit, yakni Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial. Susunan organisasi

tersebut dapat diinterpretasikan bahwa penelitian telah menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Keseluruhan unsur di lingkungan Kementerian Sosial RI harus ikut mengawal dan bertanggungjawab atas keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, baik pada tahap penyusunan, implementasi, hingga evaluasi atas suatu kebijakan atau program maupun dalam penyelenggaraan penelitian. Namun kenyataannya sejak tahap implementasi, koordinasi, evaluasi hingga reformasi kebijakan; sinergitas antar unsur tersebut masih belum optimal.

Belum optimalnya koordinasi antar unsur di lingkungan Kementerian Sosial RI ini dapat dilihat dari keberadaan pengkajian dan atau ujicoba yang dilaksanakan unit teknis, bahkan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial melalui Bidang Program dan Informasi pernah bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung melaksanakan pengkajian terhadap penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tertentu, padahal secara fungsional kegiatan pengkajian dan ujicoba merupakan kompetensi peneliti. Ikhwal ini menyisakan sejumlah permasalahan yang harus segera diketahui jawabnya, yakni 1) apakah volume pekerjaan itu sangat besar, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan oleh lembaga di luar Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos) Jakarta dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta; atau 2) apakah unit teknis beserta Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial masih meragukan kemampuan Puslitbangkesos dan B2P3KS beserta sumber daya manusia yang mereka miliki dalam penyelenggaraan penelitian; atau 3) kurangnya komitmen pemangku kebijakan terhadap keberadaan Puslitbangkesos dan B2P3KS beserta sumber daya manusia yang dimiliki dalam penyelenggaraan penelitian.

Serangkaian upaya untuk menjadikan penelitian sebagai basis kebijakan dan

program telah mulai dilakukan Puslitbangkesos sejak akhir tahun 2000, baik dengan strategi dialog maupun surat-menyurat. Pembahasan penentuan *issue* yang dipandang krusial untuk diteliti, topik penelitian, serta penentuan judul penelitian telah dilakukan dengan melibatkan aparat unit teknis dalam pelaksanaan penelitian, baik sebagai konsultan, narasumber, maupun anggota tim penelitian. Kendati upaya tersebut belum membuahkan hasil yang optimal, namun telah mendapatkan apresiasi, baik dari lembaga di luar Kementerian Sosial RI maupun dari unit teknis di lingkungan Kementerian Sosial RI.

Sebagai ilustrasi, apresiasi Komisi VII DPR RI terhadap hasil yang dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dalam rapat konsultasi Kementerian Sosial RI dengan DPR RI pada tahun 2003. Senada dengan hal itu, Kepala Bidang Program dan Informasi Direktorat Penanggulangan Korban Bencana Alam pada pertemuan evaluasi hasil penelitian Puslitbangkesos Tahun 2011 mengungkap adanya relevansi hasil penelitian dalam menunjang keberhasilan suatu program. Ungkapan ini mengindikasikan pentingnya sebuah peneliti dalam upaya optimalisasi *output* program. Informasi penting lainnya adalah hasil penelitian tentang Standarisasi Panti yang telah dijadikan Peraturan Menteri Sosial RI; dan hasil penelitian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2012 yang telah memberikan kontribusi besar bagi Kementerian Sosial RI dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tidak kurang sejumlah pemerintah daerah juga memberikan apresiasi terhadap kinerja peneliti Kementerian Sosial RI dalam pelaksanaan penelitian tentang Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Ketahanan Pangan di Daerah Tertinggal terkait dengan upaya sinkronisasi Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Agimuga, Timika, Papua (Harian Radar Timika, 7 Mei 2012).

Kesadaran akan pentingnya kontribusi penelitian dan pengembangan sebagai *supporting system* dalam proses kebijakan publik semakin menguat pada satu dasawarsa terakhir ini. Kondisi ini tercermin dari wacana

Program Berbasis Riset yang senantiasa dikemukakan oleh Menteri Sosial RI, Sekretaris Jenderal Kemensos RI, serta Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial pada beberapa pertemuan, kendati hingga akhir tahun anggaran 2016, wacana tersebut belum ditindaklanjuti dengan keputusan atau peraturan setingkat menteri yang mengatur bagaimana sistem dan mekanisme yang mengatur tentang implementasi dari program berbasis riset.

Program berbasis riset dapat dimaknai bahwa hasil penelitian dan pengembangan bukan hanya sekadar sebagai dokumen dan berfungsi sebagai penunjang, namun merupakan dasar dari serangkaian proses kebijakan di

pengembangan tidak untuk diimplementasikan, melainkan berfungsi sebagai dasar atau referensi empirik bagi seluruh tahapan kebijakan, sedang yang diimplementasikan adalah kebijakan dan program.

2. Kondisi Peneliti

Hingga akhir tahun 2016 jumlah pejabat fungsional peneliti dari seluruh kementerian dan lembaga yang tercatat pada arsip Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusbindiklat Peneliti LIPI) adalah sebagai berikut.

Tabel 4
Jumlah Pejabat Fungsional Peneliti di Lingkungan Kementerian/Lembaga
Tahun 2008 - 2016

Tahun	Peneliti Pertama	Peneliti Muda	Peneliti Madya	Peneliti Utama	Jumlah
2008	1608	2040	2655	1023	7326
2006	1526	2059	2398	763	6746
2011	2055	2064	2562	977	7658
2009	2098	2091	2668	1029	7886
2010	2020	2091	2613	778	7502
2007	1600	2105	2357	856	6918
2012	2191	2177	2633	1074	8075
2005	1847	2375	2710	817	7749
2013	2611	2447	2639	1016	8713
2014	2728	2630	2715	1055	9128
2015	2764	2873	2662	1009	9308
2016	2825	2944	2724	1063	9556

Sumber: Pusbindiklat LIPI, 2016.

lingkungan Kementerian Sosial RI. Pentingnya hasil riset sebagai dasar proses kebijakan juga terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR-RI dengan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial pada masa persidangan III tahun 2012–2013 hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 dalam rangka peningkatankinerjapembangunankesejahteraan sosial secara berkesinambungan, berbagai hasil penelitian menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial. (laporan Kepala Bidang Analisis Kebutuhan dan Penjaminan Mutu, 7 Maret 2013). Uraian ini membawa makna bahwa hasil penelitian dan

Akhir tahun 2016 pemerintah telah mencetak peneliti sebanyak 9.556 orang peneliti, dengan rincian Peneliti Pertama sebanyak 2.825 orang, Peneliti Muda sebanyak 2.944 orang, Peneliti Madya sebanyak 2.724 orang, dan Peneliti Utama sebanyak 1.063 orang. Dari segi kuantitas, keberhasilan bangsa mencetak peneliti masih jauh dari kondisi ideal, karena baru mencapai 38 orang peneliti per 1 juta jiwa penduduk, kendati belum termasuk kalangan dosen di berbagai perguruan tinggi. Iskandar Zulkarnain, Kepala LIPI (2015) mengemukakan, dengan mengacu pada kondisi di negara-negara maju, untuk mengejar ketertinggalan kemajuan teknologi, idealnya Indonesia harus mempunyai

peneliti sebanyak 700 hingga 5000 orang peneliti per 1 juta jiwa penduduk. Atas dasar hal itu, saat ini selayaknya Indonesia memiliki paling tidak sebanyak 175.000 orang peneliti atau 18,5 kali lipat dari pejabat fungsional peneliti yang telah dimiliki. Sementara itu negara India yang sudah memiliki perbandingan 140 per satu juta penduduk. Dengan total penduduk India yang telah mencapai satu miliar lebih, praktis jumlah riil peneliti di negara itu pasti jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Indonesia. Sedangkan di negara Asia lainnya, seperti Jepang memiliki 5000 per satu juta penduduk. Korea Selatan, 5500 per sejuta penduduk, sedangkan Israel yang merupakan negara dengan jumlah periset terbanyak memiliki 6500 peneliti per sejuta penduduk (LIPI, 2015).

Keberadaan peneliti di Indonesia masih sangat dibutuhkan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Namun sejak diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil akan terjadi banyak pengurangan terutama untuk peneliti madya di lingkungan pemerintah (di kementerian dan lembaga penelitian non kementerian). Batas usia pensiun bagi peneliti madya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Batas Usia Pensiun Pejabat Fungsional ditetapkan 65 tahun telah dirubah menjadi 60 tahun melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017. Tri Handoko (Deputi Bidang Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 208 orang peneliti madya LIPI berusia 59 tahun yang harus segera memasuki masa pensiun (Jawa Pos, 2017). Kondisi ini belum termasuk sejumlah peneliti yang berada di kementerian dan lembaga penelitian non kementerian. Kenyataan ini membawa makna bahwa tugas peneliti dalam pengawalan proses kebijakan akan semakin berat.

Minimnya jumlah peneliti ini juga dijumpai di Kementerian Sosial RI yang selama ini tercatat sebanyak 73 orang (0,76%) peneliti di dua lembaga Puslitbangkesos-Jakarta dan B2P3KS-Yogyakarta. Jumlah tersebut belum dikurangi peneliti yang pindah ke instansi

lain, pensiun, dan meninggal dunia. Minimnya peneliti ini dapat dilihat dari jumlah peneliti di lingkungan Puslitbangkesos Jakarta, yakni 3 orang Peneliti Pertama, 10 orang Peneliti Muda, 16 orang Peneliti Madya, dan 4 orang Peneliti Utama, sedang B2P3KS Yogyakarta memiliki 5 orang Peneliti Pertama, 9 orang Peneliti Muda, 22 orang Peneliti Madya, dan 4 orang Peneliti Utama. Kondisi ini mengindikasikan kurang optimalnya upaya regenerasi peneliti di lingkungan Kementerian Sosial RI. Keterbatasan jumlah peneliti tersebut meninggalkan persoalan bagaimanakah kemampuan unit pelaksana penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Sosial RI (Puslitbangkesos Jakarta dan B2P3KS Yogyakarta) dalam merespon wacana proses kebijakan berbasis riset, padahal konteks ini belum menyentuh aspek kualitas dari pejabat fungsional peneliti di lingkungan Kementerian Sosial RI.

Kementerian Sosial RI telah melakukan regenerasi peneliti melalui sistem penempatan pegawai negeri untuk menduduki jabatan fungsional peneliti sejak perekrutan. Sistem penempatan dalam penerimaan pegawai ini juga diberlakukan untuk pengisian jabatan fungsional lain, seperti Penyusun Peraturan Perundangundangan. Secara eksplisit, dalam surat pengangkatan calon pegawai negeri sipil memang sudah ditempatkan di lingkungan Puslitbangkesos atau B2P3KS sebagai calon peneliti. Calon peneliti tersebut umumnya telah diperhitungkan kepemilikan bekal (*skill and knowledge*) untuk menunjang penempatannya. Ketika seseorang telah ditentukan untuk masuk *dunia riset* tentu sudah mulai dikonstruksi oleh lembaga untuk karir fungsionalnya. Walaupun masuknya calon pegawai negeri sipil merupakan satu tambahan energi bagi lembaga, namun pemanfaatannya seringkali kurang sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam surat pengangkatannya. Penjelasannya sangat sederhana, yakni untuk mengatasi masalah keterbatasan sumberdaya manusia.

Dalam konteks pengembangan karier, sejumlah kemudahan telah diberikan kepada pegawai negeri sipil untuk menentukan pilihan karier. Meski demikian jabatan fungsional

peneliti bukanlah merupakan wahana alternatif ketika seorang pegawai kesulitan untuk memperoleh jabatan struktural dan/atau untuk memperpanjang masa aktif menjelang pensiun. Pejabat fungsional peneliti juga telah diberikan berbagai kemudahan untuk meniti jenjang. Pengusulan kenaikan jenjang jabatan yang notabene harus melalui pengajuan angka kredit dapat dilakukan setelah satu tahun sejak ditetapkan atau bahkan ada kemungkinan terjadi lompatan jabatan. Namun ironisnya, kebanyakan peneliti masih memacu kecepatan dengan batas minimal yang dipersyaratkan, artinya kebanyakan peneliti belum mengambil peluang yang diberikan. Kebanyakan peneliti cenderung lebih memilih mengambil "jalur aman". Pengajuan angka kredit diajukan ketika menjelang akhir jabatan yang sudah ditentukan. Dalam konteks tersebut, persoalan yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana sistem pembinaan pejabat fungsional peneliti dan fungsional lainnya di lingkungan Kementerian Sosial RI. Bagaimana kepedulian pimpinan terhadap pengembangan karier peneliti.

Upaya pengembangan karier pejabat fungsional peneliti di lingkungan Kementerian Sosial RI tidak hanya terkait dengan keberadaan dukungan dari lembaga yang menaunginya (Badiklitpensos), namun ada lembaga penting yang sangat menentukan karier peneliti, yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Karena itu sinergitas antara kedua lembaga ini sangat diperlukan, namun hingga saat ini hubungan antara Badiklitpensos dengan LIPI seolah terputus. Sebagai ilustrasi, dalam kerangka sosialisasi perkembangan sistem penilaian angka kredit, persyaratan dan nilai produk penelitian dan pengembangan di LIPI tidak atau kurang mendapatkan respon dari pimpinan. Seolah hal ini hanya untuk kepentingan angka kredit bagi peneliti, bukan kepentingan lembaga. Padahal dalam struktur organisasi jelas digariskan bahwa untuk pengusulan kenaikan jenjang jabatan fungsional dan pangkat menjadi salah satu bagian dari tugas lembaga.

Di satu sisi, peneliti memang dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat *diimplementasikan*. Di sisi lain kapasitas

peneliti harus senantiasa dikembangkan. Iskandar Siregar dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor di *Japan Foundation*, Gedung Summitmas I, Jakarta, Rabu (27/3/2013), mengatakan bahwa ada tiga faktor utama yang kerap membuat peneliti tidak berencana untuk maju. Faktor pertama adalah berasal dari diri peneliti itu sendiri, apakah masih ingin mengembangkan diri atau tidak. Biasanya yang menyerah, dikarenakan keberadaan infrastruktur dan fasilitas penelitian di Indonesia ini belum semapan negara lain. Faktor kedua adalah insentif untuk para peneliti. Namun untuk saat ini insentif bagi para peneliti sudah mulai meningkat, terutama terkait dengan keberadaan Tunjangan Kinerja. Tanpa ada insentif para peneliti tidak dapat melanjutkan penelitiannya untuk terus maju. Faktor ketiga adalah kapasitas untuk membuat jaringan. Ikhwal ini dianggap paling sulit, karena tidak semua orang bersedia dan mampu membuat jaringan dengan pihak lain dalam mengembangkan kemampuan penelitiannya (Afiffah, 2013).

Apabila pandangan Iskandar Siregar dicermati, determinasi tidak hanya dari faktor individu peneliti, namun termasuk juga faktor lembaga penelitian yang menaungi peneliti dan sistemnya. Disadari atau tidak, peneliti adalah jabatan yang terikat pada lembaga yang menaunginya, sehingga untuk menjalin relasi dengan dunia luar tidak hanya didasarkan pada kapasitas peneliti untuk membuat jaringan. Sebagai ilustrasi, untuk pengembangan peneliti, telah terbentuk Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK). Pada awal terbentuknya didasari keberadaan kerjasama pelaksanaan penelitian antar lembaga, seperti kerjasama antara peneliti dari Kementerian Kehutanan RI dengan peneliti dari Kementerian Sosial RI, kendati masih bersifat perseorangan, belum dalam bentuk antar lembaga.

FKK bukanlah semata-mata untuk memfasilitasi peneliti dalam membangun jaringan antar peneliti di Indonesia. Disadari ataupun tidak, terjalinnya hubungan antar litbang ini merupakan gagasan dan kehendak negara sejak era Orde Lama. Karenanya FKK dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pengejawantahan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1964 tentang Badan Perencanaan dan Penelitian Departemen yang antara lain mengatur bahwa Badan Perencanaan dan Penelitian mempunyai tugas mengadakan hubungan-hubungan teratur dan sistematis dengan Departemen *Research* Nasional serta semua lembaga-lembaga *research* yang berada dalam wewenang departemen tersebut guna keperluan pengumpulan data ilmiah seperlunya. Berdasarkan uraian ini jelas, bahwa lembaga yang sekarang dengan nomenklatur Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (Badiklitpensos) mempunyai tugas berkoordinasi dengan lembaga litbang yang lain serta Dewan Riset Nasional. Persoalannya adalah bagaimana masing-masing lembaga litbang tersebut mengambil peran dalam penyelenggaraan FKK?, apakah FKK merupakan "jembatan" untuk membangun kerjasama antarlitbang dalam pelaksanaan penelitian? Berapa banyak *Memorandum of Understanding* kerjasama antarlembaga litbang yang telah dihasilkan FKK?

Pelaksanaan penelitian dengan dana hibah (bantuan sosial) pemerintah melalui Ditjen Dikti tahun 2009 yang selanjutnya dialihkan ke Kemenristek (2010-2012) merupakan pengalaman yang menarik untuk dijadikan kajian. Ribuan peneliti berbaur dalam beberapa *event* penting. Kendati setiap tim penelitian berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya, namun di sela-sela kesibukan setiap peneliti mempunyai peluang besar untuk memperoleh informasi, dan menjalin relasi dengan peneliti dari berbagai lembaga, bahkan "reuni" peneliti yang berasal dari satu almamaterpun terjadi. Ribuan kartu nama keluar-masuk dompet, dan ribuan kontak person tersimpan di telepon seluler. Persoalannya, apakah perkenalan, pertukaran kartu nama, kontak person, dan "reuni" pada *event* tersebut telah membuahkan hasil?, misalnya dalam bentuk penelitian bersama dan/atau kolaborasi penelitian antarlembaga penelitian, atau minimal antar peneliti?

Pada sejumlah *event* penting, baik dalam penyelenggaraan FKK maupun penelitian dengan

dana bantuan sosial melalui Dikti-2009 serta Ristek 2010-2012); peranan masing-masing lembaga penelitian sangatlah besar, demikian halnya untuk sampai pada tingkatan kerjasama antar peneliti. Persoalannya, bagaimanakah bentuk fasilitasi dari masing-masing lembaga penelitian kepada peneliti dalam upaya menjalin dan membangun relasi antarpeleliti antarlitbang. Aspek lain yang sangat penting dalam mengatasi keterbatasan dana di lembaga litbang, peneliti juga berpeluang untuk memperoleh dana dari lembaga di luar litbang tempat peneliti bernaung, seperti Kebijakan Pendanaan Riset Pembangunan Indonesia yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Olah Raga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat dikurangkan dari Keputusan Presiden, serta Penganggaran dana riset dari Dewan Riset Nasional untuk Riset Unggulan Terpadu (RUT) dan Riset Unggulan Terpadu Kemitraan (RUTK).

Meski peneliti diberi keleluasaan untuk mengekspresikan buah pikirannya melalui pengajuan proposal untuk memperoleh pendanaan dari lembaga lain, namun tanpa adanya dukungan dari lembaga (legitimasi) tempat peneliti bernaung, maka program (suplemen) peneliti tidak akan dapat diperoleh peneliti. Sekali lagi, aspek terpenting yang memerlukan perhatian seksama dalam rangka pembinaan peneliti adalah komitmen lembaga.

3. Komitmen dalam Pengembangan Penelitian

Keseriusan bangsa dalam pengembangan penelitian diantaranya dapat dilihat dari alokasi dana penelitian. Sejak tahun 2005 hingga 2010 alokasi dana penelitian sudah banyak mengalami peningkatan hingga 200%. Dana penelitian pada tahun 2010 sebesar Rp 1,9 triliun, atau 0,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Apabila disandingkan dengan alokasi dana untuk penelitian di negara-negara lain, pembiayaan untuk penelitian di Indonesia masih dinilai rendah. Bahkan apabila menyimak

pengalaman penyelenggaraan riset, seringkali terjadi penyusutan dana yang sudah dipagukan. Dana riset di Indonesia masih didominasi oleh pemerintah, yakni sebesar 81,1%, kendati hanya 0,08% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Puan Maharani (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI) anggaran ini masih jauh di bawah anggaran yang direkomendasikan UNESCO, yakni sebesar 2% dari PDB (Rinaldi, 2016). Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, berbagai pengurangan menyangkut lokasi penelitian, alokasi waktu pengumpulan data, pelaksana, bahkan tahapan kegiatan menjadi alternatif yang tidak dapat dilakukan dan harus diterima. Ikhwal ini tentu saja kontra-produktif bagi upaya optimalisasi hasil penelitian dan membawa implikasi negatif terhadap wacana Proses Kebijakan Berbasis Riset.

Minimnya dana tentu akan berdampak pada pendistribusiannya ke seluruh lembaga penelitian. Penyelenggaraan penelitian ditentukan dengan skala prioritas dan alokasi

Sosial RI untuk Badiklitkesos pada tahun 2013 sebesar Rp 16.188.123.174.000,- yang didistribusikan antara lain kepada 1) Sekretariat Badiklitkesos Jakarta, 2) Puslitbangkesos Jakarta, 3) Pusdiklatkesos Jakarta, 4) B2P3KS Yogyakarta, 5) B2P2KS Padang, 6) B2P2KS Lembang, 7) B2P2KS Yogyakarta, 8) B2P2KS Banjarmasin, 9) B2P2KS Makassar, 10) B2P2KS Jayapura, dan 11) STKS Bandung sebesar Rp 245.640.040.000,- atau 1,52% dari anggaran Kementerian Sosial RI. Proporsi anggaran Badiklitkesos (termasuk 11 unit kerja teknis di bawahnya) terhadap anggaran Kementerian Sosial RI ini tidak lebih baik apabila dibandingkan dengan proporsi anggaran Balitbangsos (termasuk 4 unit kerja teknis di bawahnya, yakni 1) Sekretariat Balitbangsos, 2) Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, 3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, dan 4) B2P3KS) sejak tahun 1984/1985 hingga tahun 1993/1994 seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5
Proporsi Nilai Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial terhadap Nilai Anggaran Departemen Sosial RI Tahun Anggaran 1984/1985 - 1993/1994

No	Tahun	Nilai Anggaran		Persentase Proporsi
		Depsos RI (Rp)	Balitbangsos (Rp)	
1	1984/1985	53.240.681.000	1.170.000.000	2,20
2	1985/1986	53.490.001.900	102.850.000	0,19
3	1986/1987	37.226.625.000	359.196.000	0,96
4	1987/1988	12.948.000.000	167.000.000	1,29
5	1988/1989	15.446.209.000	165.263.000	1,07
6	1989/1990	20.635.471.000	116.819.000	0,57
7	1990/1991	33.858.082.000	240.717.000	0,71
8	1991/1992	50.938.405.000	490.000.000	0,96
9	1992/1993	66.603.176.000	457.663.000	0,69
10	1993/1994	78.471.557.000	510.869.000	0,65

Sumber: Memori Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Masa Bakti Periode Repelita IV dan V

waktu yang sangat terbatas. Dalam kondisi ini hampir dapat dipastikan, bahwa penelitian tersebut tidak mampu memberikan kontribusi secara politis. Minimnya alokasi dana untuk penelitian juga terjadi di lingkungan Kementerian Sosial RI. Kondisi ini dapat dicermati dari distribusi anggaran Kementerian Sosial RI kepada Badiklitkesos. Alokasi anggaran Kementerian

Persentase proporsi nilai anggaran Badiklitkesos terhadap nilai anggaran Kementerian Sosial RI sebesar 1,52 persen pada tahun 2013 tidak lebih baik dari persentase proporsi nilai anggaran Balitbangsos dengan nilai anggaran Departemen Sosial RI pada periode 1984-1994 mengingat perbedaan jumlah unit pelaksana teknis di bawahnya,

yakni 11:4. Secara ideal, hasil penelitian akan memperoleh manfaat optimal apabila didukung penganggaran yang didasarkan pada tahapan kegiatan yang akan dan harus dilaksanakan. Seperti diketahui, dalam pemenuhan prinsip metodologi penelitian, serangkaian tahapan kegiatan harus dilalui secara seksama menyangkut alokasi waktu, jumlah tenaga, kesesuaian lokasi dengan karakteristik sasaran, dan jumlah sasaran penelitian. Namun kenyataannya penyelenggaraan penelitian harus menyesuaikan alokasi dana yang sudah ditentukan dengan istilah *Pagu Anggaran*. Ironis; ketika wacana Proses Kebijakan Berbasis Riset marak diperbincangkan dan tuntutan masyarakat terhadap hasil *research and development* semakin meluas, namun nilai anggaran penyelenggaraan penelitian dan pengembangan justru semakin menurun.

Komitmen lembaga tidak hanya sebatas bagaimana penganggaran dan pemecahan masalah dalam mengatasi minimnya pendanaan penelitian, namun juga termasuk peningkatan hasil penelitian dan optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian. Meski peneliti adalah pejabat yang dilegitimasi dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam sistem manajemen pemerintahan, kewenangan administrasi sepenuhnya berada "ditangan" pejabat struktural. Komitmen lembaga dalam pengembangan penelitian juga dapat diamati dari beberapa kali perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Sosial RI, terutama pada era reformasi, yakni ketika terbentuknya Departemen Sosial RI baru pada tahun 2001 setelah sebelumnya dilikuidasi bersamaan dengan Departemen Penerangan RI. Pada masa itu lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Sosial RI digabung dengan lembaga pendidikan dan pelatihan (yang sebelumnya di bawah Sekretariat Jenderal) menggunakan nomenklatur Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial atau Balatbangsos. Satu hal yang mempunyai makna paling mendasar, yakni penelitian tidak secara eksplisit tertuang dalam nomenklatur tersebut, meski turunan (lembaga di bawahnya) disebut Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan

Sosial (Puslitbangkesos) dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian. Nomenklatur tersebut dapat diinterpretasikan, seolah kegiatan penelitian kurang mendapatkan tempat, terlebih-lebih apabila dibandingkan dengan struktur organisasi kelitbangan di lingkungan Departemen Sosial RI pada masa orde baru yang menggunakan nomenklatur Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial, dan B2P3KS dengan tugas pokok serta fungsi sesuai bidangnya.

Pada masa itu Balatbangsos didukung empat unit kerja di bawahnya, yakni 1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial; 2) Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial; 3) Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial, serta 4) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Sekitar sepuluh tahun kemudian (2001-2009) nomenklatur lembaga diubah menjadi Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (Badiklitkesos). Perubahan tersebut diikuti peleburan Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial ke dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian unit kerja di bawah Badiklitkesos tinggal tersisa dua unit, yakni Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial serta Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Aspek menarik dari sejarah perjalanan kelitbangan di Kementerian Sosial RI yang perlu dicermati adalah komitmen lembaga, antara lain menyangkut:

1. Kegundahan pemangku mengenai eksistensi Puslitbangkesos dan B2P3KS yang dipicu dari pertanyaan apakah perbedaan mendasar dari kedua lembaga tersebut. Apabila tugas pokok dan fungsinya sama, maka salah satu dari lembaga tersebut harus ditiadakan alias dibubarkan. Alasannya sangat sederhana, yakni efisiensi. Kegundahan ini sering tampak pada sejumlah *event* pertemuan antara struktural dengan peneliti dan pejabat

fungsional lainnya. Apabila persoalan ini merupakan *issue* krusial yang membutuhkan jawaban, mengapa tidak ada inisiatif dari lembaga untuk mencari jawaban secara khusus melalui penelitian, seminar, atau bentuk lainnya. Bilamana dipandang penting, hadirkan pakar dan praktisi untuk membahas keberadaan kedua lembaga tersebut.

2. Ditinjau dari segi anggaran penyelenggaraan litbang, apabila besar anggaran ditentukan berdasarkan pagu, mengapa ketika terjadi peleburan lembaga ke dalam Puslitbangkesos, dana penelitian yang dialokasikan ke Puslitbangkesos berdasarkan pagu tidak bertambah secara signifikan. Ketika Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat juga dilebur ke dalam Puslitbangkesos, dana dan kegiatan tidak bertambah. Apabila dicermati, jawabnya sangat sederhana, yakni yang *merger* hanya peneliti, artinya peneliti Pusat Penelitian Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat dipindahkan ke Puslitbangkesos. *Mergertidak* diikuti Program penelitian berikut anggaran yang menjadi bagian penting dari kedua lembaga tersebut.
3. Eksistensi suatu lembaga pada dasarnya dapat dilihat dari produk yang telah dihasilkan. Dalam konteks litbang, produk yang dihasilkan adalah informasi, baik dalam bentuk buku yang diterbitkan maupun melalui media lain. Bahkan dalam pencetakan buku, produk litbang telah didaftarkan di Perpustakaan Negara untuk memperoleh ISBN (*Internasional Series Book Number*). Implikasi dari pendaftaran ISBN tersebut adalah produksi litbang telah diketahui oleh dunia (minimal nama penulis, abstrak dan daftar isi). Konsekuensi logis dari pendaftaran ISBN tersebut adalah litbang harus menyediakan produk buku tersebut sebagai dokumen. Hasil penelitian yang telah diterbitkan wajib didistribusikan (dipublikasikan) ke Perpustakaan Litbang (sebagai dokumen), Perpustakaan Kementerian Sosial RI, dan unit teknis di Kementerian Sosial RI

(sebagai referensi untuk kebijakan), serta ke beberapa instansi daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/ kabupaten sebagai pertanggungjawaban litbang kepada pemerintah daerah yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian ini juga harus didistribusikan ke Perpustakaan Negara sebagai pertanggungjawaban atas permintaan ISBN, ke PDII LIPI sebagai dokumen untuk penelusuran karya ilmiah serta beberapa perpustakaan pada sejumlah perguruan tinggi sebagai referensi bagi mahasiswa. Keseriusan lembaga dalam penerbitan dan pendistribusian hasil penelitian, baik untuk kebutuhan dokumen maupun referensi masih perlu ditingkatkan. Kurangnya keseriusan lembaga dalam pendistribusian hasil penelitian tercermin pada pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian di sejumlah lokasi penelitian, namun demikian warga masyarakat tetap mengapresiasi hasil penelitian tersebut. Sosialisasi hasil penelitian tentang Kontribusi Organisasi Sosial dalam Pengembangan Kesejahteraan Sosial di Kupang Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 April 2011 telah mendapatkan apresiasi dari kalangan perguruan tinggi, instansi lintas sektoral, lembaga swadaya masyarakat, dan praktisi organisasi sosial setempat. (Harian Pos Kupang, 16 April 2011 dan Timor Express, 16 April 2011). Hasil penelitian tentang Kontribusi Organisasi Sosial dalam Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Asistensi Kesejahteraan Sosial juga mendapatkan apresiasi perguruan tinggi, instansi terkait, dan LSM pada acara Diseminasi Hasil Penelitian di Surabaya Jawa Timur (Rahmat, 2011).

E. SIMPULAN

Eksistensi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial di era industrialisasi dan globalisasi informasi dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, bahkan sangat diperlukan sejumlah pihak di luar Kementerian Sosial RI sebagai wahana eksplorasi referensi empirik bagi proses kebijakan publik. Demikian halnya di lingkungan Kementerian Sosial RI, selama

satu dekade lebih proses kebijakan berbasis riset juga telah dijadikan wacana penting oleh pemangku mulai dari Menteri Sosial RI, pejabat eselon I hingga pejabat eselon II. Namun di tingkat implementasi, sinergitas antara unit teknis operasional dengan unit penelitian dan pengembangan belum optimal. Karena itu, optimalisasi wacana proses kebijakan berbasis riset sudah selayaknya dilegitimasi dengan suatu aturan setingkat menteri yang mengikat setiap unit, seperti halnya pengalaman di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Hasil Penelitian.

Optimalisasi wacana proses kebijakan berbasis riset selayaknya diupayakan sejak penentuan isu penelitian, perumusan masalah penelitian hingga pelaporan hasil yang dicapai senantiasa didasari pemenuhan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah (metodologi dan administrasi) penelitian untuk menjamin kredibilitas penelitian. Konsekuensi logis dari hal ini sangat terkait dengan kesiapan peneliti dan sarana prasarana penelitian, termasuk dukungan anggaran. Persoalannya adalah besarnya anggaran penyelenggaraan penelitian di lingkungan Kementerian Sosial masih ditentukan berdasarkan Pagu. Sehingga penyusunan rancangan penelitian senantiasa terikat oleh besarnya Pagu yang tersedia. Urgensi persoalannya adalah bagaimanakah proporsi ideal antara besarnya anggaran penelitian ketika dibandingkan dengan besarnya anggaran penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial? Untuk menjawab persoalan ini perlu dialog untuk membangun persamaan persepsi antar unit di lingkungan Kementerian Sosial RI. Adalah suatu keniscayaan bahwa optimalisasi wacana proses kebijakan berbasis riset memerlukan kesungguhan dukungan dan komitmen dari segenap unsur di lingkungan Kementerian Sosial RI. Semoga naskah ini mempunyai makna bagi kita semua.

Ucapan Terima Kasih.

Diucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada sumber data penelitian, redaksi,

dan mitra bestari atas terselesaikannya dan terbitnya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffah, R. (2013, 03 28). *3 Faktor Penyebab Minimnya Jumlah Peneliti Indonesia*. Dipetik 06 12, 2017, dari Kompas.com: <http://edukasi.kompas.com/read/2013/03/28/14310593/3.Faktor.Penyebab.Minimnya.Jumlah.Peneliti.Indonesia>
- Budi Winarno (2007). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dunn, W. (1999). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Endro Winarno. (1997). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Finance, D. (2012, 03 11). *Duh Indonesia Belum Serius Cetak Peneliti*. Dipetik 09 12, 2016, dari Detik Finance.com: <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1863768/duh-indonesia-belum-serius-cetak-%20peneliti>
- Grehenson, G. (2015, 06 12). *Adrinof Pastikan Kebijakan Pemerintah Diarahkan Berbasis Riset*. Dipetik 07 17, 2017, dari Universitas Gadjah Mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/10105-adrinof.pastikan.kebijakan.pemerintah.diarahkan.berbasis.riset>
- Gubernur Kalimantan Selatan. (2012). *Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Hasil Penelitian*. Banjarmasin.
- Jawa Pos. (2017, 05 12). *Peneliti Pensiun Lebih Awal*. Dipetik 06 10, 2017, dari Pressreader: <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20170512/281569470647797>
- Jeanindya, M. (2010). *Libatkan Peneliti dalam Kebijakan Nasional: Sudah saatnya Sains Masuk ke perdebatan-perdebatan di Parlemen untuk menentukan Kebijakan, Perlu Banyak Peneliti Muda*. *Media Indonesia*, 20 Oktober 2010 .

- Kemenristekdikti. (2015). *Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi*. <http://www.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/07/ANNUAL-REPORT-2015-VERSI-LOW-RESS.pdf>: Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi.
- Kemenristekdikti. (2016). *Rencana Induk Riset Nasional*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Kementerian Sosial. *Memori Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Masa Bhakti Periode Repelita IV dan V*. Jakarta.
- Kompas. (2017, 07 29). *Kompas*. Dipetik 08 20, 2017, dari Kaji Ulang Aturan Pelaksanaan: <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170729/281797104067791>
- LIPI dan BKN. (2009). *Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan*. Jakarta.
- LIPI. (n.d). *Data Paneliti*. Dipetik Juli 16, 2017, dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Peneliti : <http://pusbindiklat.lipi.go.id/pembinaan-peneliti/data-peneliti/>
- LIPI. (2015, januari 04). *Kemenristekdikti: Peneliti Di Indonesia Harus Ditambah*. Dipetik Juli 17, 2017, dari LIPI: <http://lipi.go.id/berita/single/KEMENRISTEKDIKTI-JUMLAH-PENELITI-DI-INDONESIA-HARUS-DITAMBAH/12395>
- Lukman, S. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Menteri Riset dan Teknologi. (2010). *Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Agenda Riset Nasional 2010-2014*. Jakarta: <http://www.drn.go.id/files/buku-ARN-2010-2014.pdf>.
- Nielson, C. (2003). *Modern Supermarket*. Jakarta: UI Press.
- Parson, W. (2006). *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pos Kupang, 16 April 2011.
- Rahmat. (2011). AKSK tak Jalan dan Orsos Butuh Penguatan. *Harian Bhirawa* 21 April 2011.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta, Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Menjabat Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional*. Jakarta: Kemenhukham.
- Republik Indonesia. (2011). *Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 2011-2015*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1994). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1964). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1964 tentang Badan Perencanaan dan Penelitian Departemen*. Jakarta.
- Rinaldi, R. (2016, Maret 11). *Menteri Puan Akui Anggaran Riset di Indonesia Masih Rendah*. Dipetik 07 17, 2017, dari Tribun. News.com: <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/03/11/menteri-puan-akui-anggaran-riset-di-indonesia-masih-rendah>
- Sidik, R. (2013, 10 27). *Strategi Pengembangan Pasar Bisnis Waralaba serta dampaknya terhadap Pasar*

Tradisional. Dipetik 6 12, 2015, dari Ada Disini Asa: <https://adadisiniada.wordpress.com/2013/10/27/strategi-pengembangan-pasar-bisnis-waralaba-serta-dampaknya-terhadap-pasar-tradisional/>

Soetomo. (2012). *Keswadayaan Masyarakat, Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Timor Expres, 16 April 2011.